



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELUANG DAN TANTANGAN EKSPANSI TRANSAKSI BERBASIS MATA UANG LOKAL (LCT)

Deniza Mulia Nita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
deniza.nita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Fenomena yang berkembang dalam sistem keuangan Indonesia saat ini adalah meningkatnya penggunaan *local currency transaction* (LCT) dalam hubungan dagang dan investasi internasional. Presiden Direktur Bank ICBC Indonesia, Chen Yong, dalam sambutannya pada Forum Bisnis LCT Indonesia-Tiongkok 2025 menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus mendukung inisiatif pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperluas pemanfaatan LCT serta meningkatkan peran renminbi (RMB) sebagai salah satu mata uang utama dalam transaksi internasional. Ia menuturkan bahwa capaian volume transaksi LCT Bank ICBC Indonesia pada paruh pertama 2025 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total volume pada akhir 2024, menandakan semakin besarnya penerimaan terhadap transaksi berbasis mata uang lokal.

Perkembangan serupa juga terjadi dalam kerja sama dengan Jepang. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang menegaskan bahwa kedua negara kini semakin intensif menggunakan skema LCT dalam transaksi perdagangan maupun investasi. Melalui mekanisme ini, Indonesia dan Jepang sepakat menyelesaikan pembayaran langsung dengan menggunakan rupiah dan yen tanpa melalui dolar Amerika Serikat (AS). Hingga Juli 2025 nilai transaksi LCT kedua negara telah mencapai US\$5,1 miliar atau sekitar Rp82,9 triliun, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Skema ini dijalankan melalui sistem bilateral *cross-border* yang memungkinkan transaksi berlangsung secara langsung antara rupiah dan yen, sehingga lebih efisien, transparan, dan mendukung upaya pengurangan ketergantungan pada mata uang asing tertentu.

LCT adalah skema yang memungkinkan dua negara mitra melakukan transaksi perdagangan maupun investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing, tanpa harus melalui konversi dolar AS. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi, meminimalkan ketergantungan pada dolar, serta memperkuat posisi mata uang domestik dalam perdagangan global. Implementasi LCT juga diperkuat dengan inovasi teknologi sistem pembayaran. Salah satunya adalah penerapan *quick response code indonesian standard* (QRIS) lintas negara di Jepang, yang memungkinkan konsumen Indonesia melakukan pembayaran secara langsung dengan aplikasi domestik tanpa menukar rupiah ke mata uang asing terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa LCT tidak hanya berdampak pada transaksi berskala besar, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Ekspansi LCT membawa sejumlah peluang strategis bagi perekonomian Indonesia. *Pertama*, penggunaan mata uang lokal secara langsung dapat meningkatkan efisiensi transaksi, karena pelaku usaha tidak lagi perlu melakukan konversi ganda melalui dolar AS. *Kedua*, diversifikasi penggunaan mata uang di tingkat internasional dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik dari volatilitas nilai tukar dolar AS yang selama ini mendominasi perdagangan global. *Ketiga*, inovasi digital dalam sistem pembayaran lintas negara membuka jalan bagi inklusi

keuangan yang lebih luas, tidak hanya untuk korporasi besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah serta konsumen umum. Dengan demikian, LCT dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mempercepat integrasi Indonesia ke dalam ekonomi digital global.

Meski demikian, penerapan LCT juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Adopsinya masih terbatas pada korporasi besar dengan kapasitas transaksi internasional signifikan, sementara pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum sepenuhnya terintegrasi. Dari sisi kelembagaan, keberhasilan LCT sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur keuangan lintas negara, termasuk koordinasi antarbank dan harmonisasi regulasi antarotoritas. Selain itu, penggunaan RMB maupun yen juga membawa risiko tersendiri, karena perkembangan ekonomi Tiongkok dan Jepang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar di kawasan dan berdampak pada harga domestik di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan transaksi berbasis mata uang lokal antara Indonesia dengan Tiongkok dan Jepang merupakan langkah strategis dalam mengurangi dominasi dolar AS serta memperkuat kemandirian sistem keuangan nasional. Namun, agar manfaat LCT dapat dirasakan lebih luas, diperlukan kebijakan yang konsisten, penguatan infrastruktur pembayaran lintas negara, serta perluasan edukasi kepada pelaku usaha. Dengan langkah tersebut, LCT berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam modernisasi sistem keuangan Indonesia dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Atensi DPR

DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan transaksi berbasis LCT antara Indonesia-Tiongkok, ataupun Indonesia-Jepang. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI dapat mengambil langkah strategis untuk memastikan implementasi LCT berjalan efektif. Pengawasan terhadap regulator Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pembayaran lintas negara, termasuk integrasi sistem digital seperti QRIS *cross-border*. Selain itu, diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terkait dampak LCT terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan keberlanjutan perdagangan internasional. Dengan langkah tersebut, Komisi XI DPR RI berperan aktif dalam memastikan kebijakan LCT benar-benar mendukung ketahanan sistem keuangan nasional.

Sumber

antaranews.com, 26 Agustus 2025;
 cnnindonesia.com, 26 Agustus 2025;
 finance.detik.com, 28 & 29 Agustus 2025; dan
 kontan.co.id, 19 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Edmira Rivani
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Uly Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Firyal Nabihah.
 Ulayya Sarfina
 Yosua Pardamean S.
 Jeffrey Ivan Vincent
 Fauzan Lazuardi R.
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*